

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Penggunaan Dana Desa, Pembangunan Belum Terlihat Menonjol
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.7
Edisi	: Senin, 12 November 2018

Penggunaan Dana Desa

Pembangunan Belum Terlihat Menonjol

LEMBANG, (GM).-

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menginventarisir penggunaan dana desa yang sudah tiga tahun digulirkan pemerintah pusat. Meski pembangunan di 165 desa sudah lebih merata, namun belum terlihat ada yang menonjol.

"Saat ini DPMD masih menginventarisir hasil-hasil dari penggunaan dana desa di KBB. Meski belum terlihat perubahan yang signifikan, penggunaan dana desa selalu dilaporkan," kata Kepala DPMD KBB Wandiana di Lembang, belum lama ini.

Dia menjelaskan, penggunaan dana desa ditujukan untuk empat bidang urusan pemerintah desa. Empat bidang tersebut ialah bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Di dalam Undang-undang tentang Desa, penggunaan dana desa harus berkaitan dengan keempat bidang itu.

"Dalam UU Desa disebutkan, seluruh indikator dalam dana desa itu wajib untuk dilaporkan. Kaitan dengan pelaksanaannya di desa, setiap desa memiliki potensi dan masalahnya masing-masing. Saya ambilkan contoh di Kecamatan Rongga, dana desanya lebih banyak digunakan buat pemberdayaan dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan," kata Wandiana.

Oleh karena itu, lanjutnya, penggunaan dana desa oleh setiap desa bakal berbeda tergantung kebutuhan atau prioritas di daerahnya masing-masing. Pada akhirnya semua itu bertujuan untuk peningkatan perekonomian desa.

"Jadi, penggunaan desa ini di setiap desa tergantung masalah, so-



DARMA LEGI/GM

SEJUMLAH pekerja menyelesaikan perbaikan jalan di Kp. Leuweung Datar, Desa Bojongheulang, Kec. Saguling, KBB, beberapa waktu lalu.

sial budaya, potensi desanya," tandasnya.

Dana desa mulai digulirkan pemerintah pusat sejak 2015. Di Bandung Barat, penyaluran dana desa untuk 165 desa ialah sebesar Rp 53 miliar pada 2015, Rp 119 miliar pada 2016, Rp 152 miliar pada 2017, dan pada 2018 sebesar Rp 183 miliar. Dengan demikian, dalam empat tahun ini, sudah digelontorkan Rp 507 miliar untuk desa-desa di KBB.

LPMD

Secara terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengatakan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memiliki peran yang sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melestarikan hasil pembangunan di desa, di samping perannya sebagai mitra Kepala Desa. Dengan demikian, para pengurusnya harua memiliki wawasan dan pengetahuan tentang

berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa.

"Untuk itu perlu peningkatan kapasitas dan penguatan pengurus LPMD melalui ESQ 165. Diharapkan bisa mengubah paradigma dan mental para pengurus LPMD agar lebih siap menghadapi pembangunan. Diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pembangunan desa dan kabupaten," ujar Bupati Umbara.

Bupati juga memandang ESQ 165 ini sebagai upaya mewujudkan Bandung Barat yang religius sebagaimana tercantum dalam visi Akur (Aspiratif Kreatif Unggul Religius) melalui sentuhan rohaniah dan mental.

"Jadi, kedepannya anggota LPMD diharapkan bisa menjadi teladan bagi masyarakat melalui ucapan dan perbuatan yang positif," harapnya. **(B.104)****